

Dua Kecamatan di Kota Depok Dilanda Banjir hingga Longsor

DEPOK (IM) - Bencana banjir melanda dua Kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat Kamis (8/12). Ribuan warga terkena dampak banjir yang bersumber dari curah hujan yang tinggi dan luapan Kali Cijantung.

Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Welman Naipos-pos mengatakan peristiwa banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Cijantung.

Dua Kecamatan yang dilanda banjir itu adalah Cilodong dan Cimanggis. Di Kecamatan Cilodong ribuan warga terkena dampak. Terparah di perumahan Pondok Tirta Mandala dan perumahan Vila Perwi. Ribuan warga di sini terisolasi. Mereka pun tidak bisa keluar rumah untuk belanja kebutuhan dapur karena rumah mereka dan jalan sekitar terkepung banjir setinggi 60-70 sentimeter.

Hujan dengan intensitas sedang-tinggi yang melanda dua wilayah di Kota Depok, Welman mengatakan juga mengakibatkan longsor. Tebing longsor terjadi di perumahan Pondok Tirta Mandala mengakibatkan Kali Cijantung tertimbun material tebing hingga air Kali naik ke permukaan jalan dan rumah-rumah warga.

Durasi hujan yang turun, lanjutnya terbilang cukup tinggi dan bahkan dari malam hari hingga pagi ini. "Jauh-jauh hari BNPB telah mengeluarkan peringatan dini waspada bencana alam menyikapi kondisi cuaca hujan yang akan berlangsung Desember 2022," katanya Kamis (8/12).

Welman menjelaskan untuk di Cilodong sampai saat ini tidak korban jiwa akibat bencana itu, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok juga bergerak cepat melakukan penanganan seperti mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir," ujarnya.

Selanjutnya, sambung Welman bencana juga melanda daerah Kecamatan Cimanggis, pohon tumbang menimpa rumah warga yang berpenghuni. Beruntung kondisi keluarga dalam keadaan selamat.

Selain menimpa rumah warga, pohon tumbang juga menutup sejumlah akses jalan, namun kondisi itu telah dilakukan penanganan oleh pihaknya bersama pihak terkait. Banjir terparah terlihat di Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti yang tinggi airnya mencapai 90 sentimeter. Pengendara mobil dan motor yang dari Transyogi ke Jakarta dan sebaliknya tidak bisa lewat dan terpaksa lewat jalan tikus. Menurut Welman buntut banjir di Jalan Jambore, selain karena curah hujan tinggi adalah tidak berfungsinya saluran drainase.

"Saluran airnya tidak berfungsi lantaran tertimbun tanah dan sampah. Ada kurang lebih 1.000 meter panjang dengan lebar 40 sentimeter tertimbun tanah dan sampah, dan air di Jalan Jambore belum surut, namun pengendaraan diimbau tetap hati-hati. Semoga hujan yang turun ini tidak menimbulkan dampak bencana yang lebih luas," harap Welman. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



KEBAKARAN DI KANTOR KEMENKUMHAM

Petugas pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan usai memadamkan kebakaran di Kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/12). Kebakaran gudang penyimpanan barang milik negara (BMN) yang berada di lantai lima Gedung Sentra Mulia Ditjen Imigrasi Kemenkumham tersebut berhasil dipadamkan dengan pengerahan 26 unit mobil pemadam beserta 130 personel.

Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik

Para pihak yang bakal mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI ini sebaiknya berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, sosok yang berasal dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih berkemampuan untuk menjadi sekda DKI Jakarta.

JAKARTA (IM) - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti proses lelang jabatan sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif yang nanti bakal berlangsung. Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifi berujar, proses lelang jabatan ini harus berlangsung sesuai aturan.

Ia menegaskan, proses lelang jabatan ini sebisa mungkin tak terkontaminasi unsur politis. Sebab, sosok yang bakal mengisi jabatan sekda DKI merupakan aparat sipil negara (ASN). "Ya kalau sesuai dengan peraturan ya enggak apa-apa, jalani saja lelang. Semuanya harus sesuai dengan

peraturan yang ada dan sedapat mungkin itu yang profesional, dalam arti bahwa tidak terlalu banyak campur tangan politik," urai Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (8/12).

"Kira-kira begitulah, ini soalnya kan memang, dari awal kita sadar bahwa tahun 2023, 2024, ini kan nanti menuju pemilihan umum 2024," lanjutnya.

Ia memandang, para pihak yang bakal mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI ini sebaiknya berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, sosok yang berasal dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dini-

lai lebih berkemampuan untuk menjadi sekda DKI Jakarta. "Sebaiknya orang yang sudah berpengalaman dalam Pemda DKI Jakarta (mengikuti proses lelang jabatan sekda DKI), saya rasa begitu," tegasnya.

Dibicarakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut Pemprov tengah melelang posisi Sekda DKI Jakarta definitif, pengganti Marullah Matali. Adapun Marullah saat ini sudah diangkat menjadi deputi gubernur. Sambil menunggu proses lelang jabatan, jabatan Sekda DKI diisi oleh Uus Kuswanto selaku penjabat sementara. "Pelantikan Sekda yang definitif, kalau saya tanya dengan BKD itu mungkin satu setengah bulan lah dari mulai sekarang, Desember-akhir Januari lah, kan di bidding (lelang)," kata Heru beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, sebelum diisi Marullah Matali, jabatan Sekda DKI diperebutkan tiga kandidat. Ketiganya adalah Penjabat (Pj) Sekda DKI Jakarta saat itu, Sri Haryati; dan Wali Kota Jakarta Utara saat itu,

Sigit Wijatmoko.

Lelang Jabatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan lelang jabatan secara terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah DKI. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya, mengatakan, sejauh ini pihak Pemprov DKI Jakarta masih mempersiapkan administrasi untuk pengumuman lelang jabatan terbuka.

Persiapan itu, menyusul mantan Sekda DKI, Marullah Matali yang kini menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan digantikan oleh Pj Sekda Uus Kuswanto. "Masih dalam ta-

hap persiapan. Kalau ada akan diumumkan secara terbuka," kata Maria kepada awak media, Kamis (8/12).

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, lelang jabatan terbuka posisi Sekda DKI merupakan langkah dan wewenang eksekutif. Namun demikian, dia berharap agar pengganti Sekda Marullah dan Pj Sekda Uus merupakan sosok lincah dan mampu membangun koordinasi serta komunikasi yang baik. "Kuncinya kan di situ, komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting agar bisa melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta," katanya. ● yan

Wawalkot Depok Berharap Wali Murid SDN Pocin 1 Batal Gugat Pemkot ke PTUN

DEPOK (IM) - Wali murid SDN Pondok Cina (Pocin) 1 berencana menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait rencana pengurusan sekolah untuk menjadi masjid. Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono berharap wali murid membatalkan rencana mengajukan gugatan.

"Kalaupun sudah diselesaikan ya, sudah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh Pak Sekda (Sekretaris Daerah) terkait masalah itu. Kami akan menunggu hasil beberapa lembaga yang memang sudah ikut menangani kasus itu," kata Imam saat ditemui setelah meninjau Bazar UMKM di Kota Depok, Kamis (8/12).

Imam mengatakan tidak perlu ada gugat-menggugat karena Pemkot Depok sudah memfasilitasi para pihak agar rencana relokasi SDN Pocin 1 berjalan dengan baik. "Kalau saya sih berharap tidak ada gugat-menggugat, ya. Kita kan sesama, kita penyelenggara kalau ortu murid itu kan, ortu murid itu adalah pengguna jasa yang diberikan dari pemerintah kepada mereka, kami sudah sebaik mungkin bagaimana memfasilitasi agar ini semuanya menjadi baik," sebut Imam.

Sejauh ini, menurut Imam, Pemkot Depok masih tetap memfasilitasi siswa SDN Pocin 1 untuk melaksanakan ujian di gedung yang lama. "Mereka (siswa) sedang ujian di sana, sedang kita fasilitasi, terus kita fasilitasi se-

gala kebutuhan ujian mereka," ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Depok juga sempat menyatakan siswa SDN Pocin 1 harus angkat kaki dari sekolah per Senin (12/12). Terkait hal itu, Imam tidak memberi jawaban pasti apakah siswa tetap direlokasi atau tidak.

"Itu sudah diselesaikan lah ya, sudah ya, cukup ya," ucapnya.

Dibicarakan sebelumnya, Pemkot Depok membatasi kegiatan belajar mengajar di SDN Pocin 1 hingga Jumat pekan ini. Terkait hal tersebut, ortu tua (ortu) murid SDN Pocin 1 berencana menggugat Pemkot Depok ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tentu itu upaya hukum yang akan kami lakukan proses hukum. Kalau bicara dari konteks hukum di pengadilan tata usaha negara, itu akan ada dua upaya. Tinggal kami klasifikasi apakah ini bentuknya perbuatan melawan hukum yang dalam istilah hukum tata negara itu," kata koordinator ortu siswa SDN Pocin 1, Ecy Tuasikal, kepada wartawan, Rabu (7/12).

Ecy mengatakan pihak wali murid sampai saat ini masih bertahan di SDN Pocin 1 hingga Pemkot Depok merelokasi bangunan untuk pemindahan siswa SDN Pocin 1 dalam satu gedung.

"Jadi kami dari orang tua tetap seperti awal ya bahwa kami akan bertahan di sana sampai ada realisasi. Realisasinya apa, kalau sudah dibangun untuk SDN Pocin 1 maka kami akan pindah," kata Ecy. ● yan



FOTO: ANT

HARGA IKAN ASIN NAIK

Warga menjemur ikan beseng-beseng (Marsosatherina ladigesii) di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/12). Menurut warga, akibat cuaca buruk yang terjadi dalam sepekan ini, membuat hasil tangkapan nelayan menurun sehingga harga ikan asin mengalami kenaikan dari harga Rp18 ribu per kilogram menjadi Rp25 ribu per kilogram.

JAKARTA UTARA TERBANYAK

7 RT di DKI Jakarta Masuk Zona Merah Covid

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat masih ada tujuh rukun tetangga (RT) zona merah rawan penularan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta.

Dari tujuh sebaran zona merah itu, Jakarta Utara paling banyak dengan empat zona merah di wilayah administrasinya.

Mengutip dari laman corona.jakarta.go.id, data RT zona merah ini merupakan periode 5-11 Desember 2022. Data RT rawan Covid-19 tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan untuk penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).

"RT zona rawan adalah RT yang memiliki tingkat resiko tinggi penularan Covid-19," demikian keterangan Pemprov DKI Jakarta, dikutip, Kamis (8/12).

Selanjutnya, Pemprov DKI juga melaporkan zona kuning dan zona oranye Covid-19 di Ibu Kota, dengan rincian 622 RT di Jakarta Pusat, 1.044 RT di Jakarta Timur, 1.265 di Jakarta Barat, 1.080 RT di Jakarta Selatan, dan 1.194 RT di Jakarta Utara.

Serta Kabupaten Kepulauan Seribu yang hanya mencatatkan satu zona kuning.

Berikut daftar tujuh RT Zona Merah di Jakarta: Jakarta Barat - Kelurahan Cengkareng Timur RT 007, RW 014 - Kelurahan Kembangan Utara RT 013, RW 009 Jakarta Selatan - Kelurahan Pondok Pinang, RT 003, RW 015 Jakarta Utara - Kelurahan Kapuk Muara RT 007, RW 002 - Kelurahan Kapuk

Muara RT 008, RW 002 - Kelurahan Pademangan Timur RT 009, RW 011 - Kelurahan Pejagalan RT 016, RW 001

Terpisah, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksiono Harbuwono mengatakan Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengalami tren peningkatan kasus virus corona dalam waktu dekat.

Namun kondisi itu hanya terjadi dengan syarat apabila tidak ditemukan mutasi SARS-CoV-2 dan varian baru di Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam beberapa hari kalau kita lihat, kalau tidak ada varian baru, mudah-mudahan tidak ada lagi peningkatan kasus," kata Dante di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).

Dante juga menilai kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai puncak gelombang kasus yang sebelumnya melahirkan tren kenaikan kasus pada tiga bulan belakangan yang disebabkan oleh Omicron subvarian XBB dan BQ.1.

Adapun mutasi Omicron subvarian XBB dan BQ.1 juga dilaporkan sudah mendominasi lebih dari 80 persen kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan kondisi ini, mayoritas masyarakat dinilai sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19 baik melalui infeksi maupun lewat program vaksinasi virus corona.

"Biasanya kalau ada varian baru, varian baru itu men-capai puncak kira-kira tiga bulan, dan kita sudah masuk ke tiga bulan. Dan mudah-mudahan ini bisa diantisipasi dianggap sudah mencapai puncak," ujarnya. ● yan

DKI Percepat Vaksinasi Booster Kedua bagi Lansia dan Nakes

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta mengakselerasi vaksinasi dosis pertama bagi warga lanjut usia (lansia) dan tenaga kesehatan (nakes) untuk menekan penularan Covid-19 khususnya bagi masyarakat pemilik penyakit penyerta.

"Hampir semua kasus positif Covid-19 yang meninggal di DKI Jakarta memiliki komorbid berat yang terbanyak adalah penyakit tidak menular," kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI, Ngabila Salama di Jakarta, Kamis (8/12).

Adapun komorbid tidak menular di antaranya diabetes melitus, hipertensi, jantung, kanker, gagal ginjal kronis serta komorbid penyakit kronis di antaranya tuberculosis (TBC) dan HIV.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Selasa

(6/12) pukul 17.20 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama mencapai 12.627.476 atau 134,58 dari target 10 juta warga di DKI

Kemudian capaian dosis dua mencapai 10.906.730 atau 116,24 persen dan dosis ketiga mencapai 5.249.845 atau 55,95 persen. Sedangkan dosis empat mencapai 119.888 atau 13,72 persen.

Adapun vaksinasi dosis empat lansia baru mencapai 6,1 persen dari target 761.279 orang dan tenaga kesehatan mencapai 66,02 persen dari target 112.301 orang.

Warga lansia dapat mengikuti vaksinasi dosis keempat enam bulan setelah vaksin ketiga meski belum ada tiket pada aplikasi PeduliLindungi.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali membuka vaksinasi sore dan malam hari untuk menggenjot capaian

vaksinasi Covid-19 dosis tiga dan empat termasuk menasar warga lanjut usia dan tenaga kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan Senin-Jumat pukul 16.00-20.00 WIB di 44 puskesmas kecamatan di seluruh DKI Jakarta atau lokasi lain yang disediakan.

Dinas Kesehatan DKI menginformasikan layanan vaksinasi malam hari melalui akun media sosial di antaranya Instagram @dinkesdki serta Instagram puskesmas dan RSUD.

Vaksinasi saat akhir pekan juga diadakan di sejumlah lokasi termasuk di Puskesmas, RSUD dan sentra vaksinasi lainnya. Vaksinasi malam hari itu untuk menasar warga yang belum mendapat imunisasi Covid-19 yakni untuk usia enam tahun ke atas, selanjutnya dosis ketiga untuk 18 tahun ke atas. ● yan

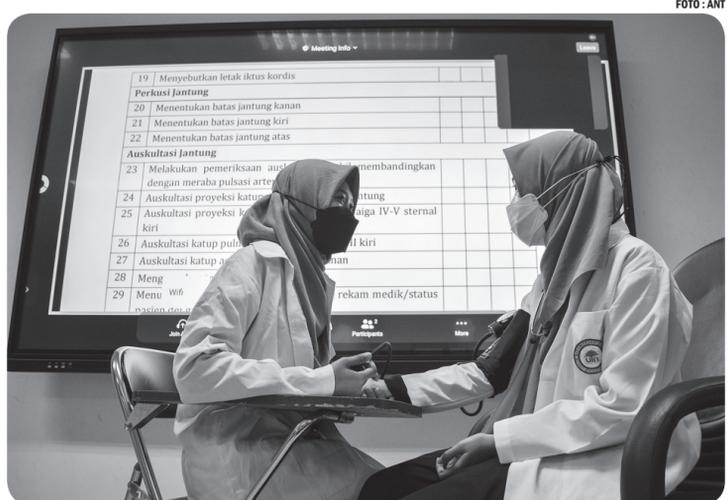


FOTO: ANT

KEMENKES TAMBAH KUOTA BEASISWA KEDOKTERAN

Mahasiswa mempraktikkan keterampilan klinik dasar saat perkuliahan di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (8/12). Kementerian Kesehatan menambah kuota beasiswa kedokteran dari 300 penerima pada 2022 menjadi 1.500 penerima pada 2023 guna memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PERSEORAN PT BAHANA PETRO INDONESIA (dalam Likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa Pemegang Saham PT Bahana Petro Indonesia, berkedudukan di Komplek Ruko Harapan Indah Blok EB No 7 RT 009 RW 019, Kelurahan Pejangan, Kecamatan Medan Satria, Bekasi 17131 - Indonesia (PERSEORAN) telah mengakhiri kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 28 November 2022 ("Berita Acara") dan telah dibuat Akta Penyelesaian Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseoran Terbatas PT. Bahana Petro Indonesia Nomor 01, tertanggal 06 Desember 2022, dibuat dihadapan RRO SETIONG, SH. Mko, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pembubaran Perseoran tertanggal sejak tanggal Berita Acara tersebut ("Tanggal Pembubaran") dan oleh karenanya mengesampingkan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Perseoran didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya Perseoran akan disebut PT BAHANA PETRO INDONESIA Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UU Perseoran Terbatas").
- Menyetujui penunjukan Dedy Subranta selaku Direksi Perseoran untuk bersama-sama bertindak sebagai likuidator ("Likuidator"), termasuk namun tidak terbatas untuk membentuk tim likuidator, dalam melakukan pembubaran Perseoran sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan UU Perseoran Terbatas untuk melakukan hal berikut:
 - Untuk hadir di hadapan pejabat dari otoritas pemerintah yang berkenaan, termasuk notaris dan pihak ketiga lainnya dan mengakhiri sebagian atau seluruh keputusan yang terdapat dalam Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani dalam bentuk akta notaris dan apabila diperlukan, untuk melaporkannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan dan Kantor Perencanaan Negara atau kepada otoritas lainnya yang berkenaan;
 - Apabila perlu, untuk bertemu dengan pejabat dari otoritas pemerintah yang sesuai berkenaan dengan keputusan yang terdapat dalam Keputusan Sirkuler dan segala hal terkait; dan
 - Untuk masing-masing dari bagian diatas, untuk menjelaskan dan membuat atau mengakhiri keputusan dibuat dan menandatangani atau mengakhiri keputusan ditandatangani surat-surat, akta-akta, membuat dan/atau mengutar pengumuman di surat kabar dan Berita Negara, permohonan-permohonan dan dokumen hukum lainnya berkenaan dengan hal-hal diatas dan untuk melaksanakan segala tindakan yang mungkin disyaratkan, dibutuhkan atau disarankan untuk memperlakukan seluruh keputusan yang terdapat di sini dan segala hal yang berkenaan dengannya.

Kepada para pihak yang memiliki tagihan kepada Perseoran dapat mengajukan tagihannya dengan disertai bukti-bukti yang sah kepada Likuidator dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini ke alamat Komplek Ruko Harapan Indah Blok EB No 7 RT 009 RW 019, Kelurahan Pejangan, Kecamatan Medan Satria, Bekasi 17131 - Indonesia.

Jakarta, 09 Desember 2022
PT BAHANA PETRO INDONESIA
(dalam Likuidasi)
LIKUIDATOR